



EDUKASI PEMILU DISABILITAS TULI Warga difabel tuli mengikuti forum disabilitas demokrasi di Bawaslu Kota Yogyakarta, Ahad (19/6). Pada acara ini, Bawaslu memberikan edukasi politik kepada warga difabel tuli. Selain itu juga diberikan edukasi tentang pengawasaan partisipatif disabilitas tuli saat pemilu.

Partisipasi Politik Disabilitas Masih Rendah

Pendidikan politik sebagai pemenuhan hak politik bagi disabilitas perlu dilakukan.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Partisipasi politik bagi penyandang disabilitas khususnya di Kota Yogyakarta dinilai masih rendah. Hal ini mendasari Pemkot Yogyakarta untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi politik, terutama pada siswa disabilitas di sekolah luar biasa (SLB). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengatakan, masih banyak kendala yang dihadapi disabilitas dalam hal partisipasi politik. Padahal, salah satu bentuk pemenuhan hak politik bagi disabilitas yakni terkait aksesibilitas pendidikan pemilu.

Untuk itu, pendidikan politik sebagai pemenuhan hak politik bagi disabilitas perlu dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan pendidikan politik yang dilakukan di SLB Negeri Pembina Yogyakarta.

Pendidikan politik dilakukan sebagai pengantar bagi siswa disabilitas yang sudah memiliki hak pilih

dalam pemilu 2024 mendatang. Ia menyebut, pendidikan politik ini akan dilakukan secara berkelanjutan kedepannya.

"Ke depan tetap akan kami fasilitasi terkait pendampingan ini, nanti kami juga bekerja sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) terkait simulasi ataupun hal lain dalam membekali pemilih pemilu difabel ketika menggunakan hak pilihnya di pemilu dan pilkada serentak 2024," kata Budi, akhir pekan lalu.

Budi berharap, hak-hak politik penyandang disabilitas terpenuhi melalui pendidikan politik tersebut. Selain itu, partisipasi disabilitas ini dalam politik juga diharapkan meningkat secara kuantitas dan kualitas. "Kesadaran semua pihak sangat penting dalam masa persiapan je- lang pemilu dan pilkada serentak 2024, sehingga semua pihak dapat berkontribusi menciptakan pemilu dan pilkada yang ramah terhadap para pemilih difabel," ujarnya.

Pasalnya, pada Pemilu 2019 lalu KPU mencatat terdapat 1,2 juta lebih

pemilih difabel. Budi juga menyebut, tunjaska sebanyak 83,182 pemilih, tunanetra 166.364 pemilih, dan tunarungu 249.546 pemilih.

"Kemudian untuk pemilih dari tunagrahita ada 332.768 dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 pemilih" jelas Budi.

Kepala SLB Negeri Pembina Yogyakarta, Nur Khasanah juga berharap pendidikan politik bagi siswa SLB maupun penyandang disabilitas dilakukan secara berkelanjutan. Dengan begitu, siswa SLB dan disabilitas khususnya di Kota Yogyakarta dapat diberikan pembekalan pengetahuan politik.

"Kami ucapkan terima kasih dan tentunya punya harapan besar kepada Pemkot Yogyakarta dan KPU untuk memberikan pendampingan yang lebih intens lagi," kata Nur.

Sementara itu, rendahnya partisipasi masyarakat pesantren juga masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Kadiv Sosialisasi, Diklih, Farmas dan SDM KPU Kabupaten Bantul, Musnif Istiqamah mengatakan, perlu adanya rumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesantren terkait pemilu.

Musnif mencontohkan seperti

adanya kebijakan terkait pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di lembaga pemasyarakatan (lapas) pada Pemilu 2020 lalu. Kebijakan tersebut membolehkan pendirian TPS di lapas dengan aturan-aturan tertentu dan menjadikan warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilu.

"Pemilu 2020 misalnya, diatur terkait pendirian TPS khusus untuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dengan ketentuan minimal ada 30 pemilih," kata dia, dalam webinar 'Membangun Partisipasi Politik Masyarakat Pesantren' yang digelar secara virtual.

Ia pun berharap ada kebijakan yang sama terhadap masyarakat pesantren dan memungkinkan didirikannya TPS di lingkungan pesantren. Hal ini nantinya dapat berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat pesantren dalam pemilu.

Pasalnya, kata Musnif, jumlah santri yang menjalankan pendidikan di pondok pesantren di Bantul cukup banyak. Namun, banyak dari santri bahkan pengajar di pondok pesantren tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

■ edy@jurnal.asiatik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005